

## DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011.

\_\_\_\_\_. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.

Arieyanti. Ghazali.2003. *Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pengalokasian Belanja Daerah di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang*.Skripsi.Medan:Universitas Sumatera Utara.

Arieyanti.2010.*Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pengalokasian Belanja Daerah di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang*.Skripsi.Medan:Universitas Sumatera Utara.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

B.Hendra Puranta. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*. Cetakan pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Halim Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/642>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Magelang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magelang)

<http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/216>

<http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/761/content%202.pdf?sequence=2>

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/33/name/jawa-tengah/detail/3308/magelang>

Irvan Muh.2013. *Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2013 Kota Pare-Pare*.Skripsi.Makassar:Universitas Hassanudin.

Mamesah.dalam .1995 dalam “*Akuntansi Keuangan Daerah*.Cetakan ketiga, Jakarta:Salemba Empat

Mardiasmo. 2002,2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Andi:Yogyakarta

Nordiawan, dkk.2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat:Jakarta.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 *Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia, Peraturan Bupati Magelang, Nomor 34 Tahun 2011 *Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Sugiyono. 2006. *Statistika untuk Penelitian*, Cetakan kesembilan, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susilawati Dwi, Mardiasmo. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja. Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.

Susilawati. Dwi. 2012. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja," Skripsi Jurusan Ekonomi Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.